

## PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DITINJAU DARI TATA KELOLA LEMBAGA PKK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PEKANBARU

Novita

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau  
E-mail : novitaq8@gmail.com

***Abstract:** Women have an active role in improving family welfare, in addition to activities at home, women as housewives also have the potential to develop, one of which is in social institutions, namely PKK (family welfare empowerment). Pekanbaru City has a PKK cadre of 249 people and this has the potential to empower family welfare during the current COVID-19 pandemic. Is the governance of the PKK institution carried out by the PKK driving cadres able to empower family welfare? The method used in this study is a survey method, the population in this study is the mothers of the PKK driving team (chairman, secretary and treasurer) with a sample of 72 people using the Slovin formula and data collected using a questionnaire and the data obtained were analyzed using simple linear regression using SPSS software version 23. The results showed that the governance of the PKK driving team had a significant effect on empowering family welfare in Pekanbaru City.*

***Keywords:** Family Welfare, Governance, PKK*

### I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan menjadi amanah pada Negara sedang berkembang seperti Indonesia saat ini. Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Isu ini menjadi sangat meminta perhatian publik baik nasional maupun internasional. Namun sampai detik ini upaya yang dilakukan masih belum optimal. Perlu adanya usaha yang lebih menjawab persoalan optimalisasi pemberdayaan perempuan secara nyata di masyarakat. Perempuan memiliki peran yang aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, selain beraktifitas di rumah, perempuan sebagai ibu rumah tangga juga memiliki potensi untuk berkembang salah satu diantaranya adalah pada lembaga kemasyarakatan yakni PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga).

PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk

mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sasarannya ditujukan untuk mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan (Biro Pemberdayaan Perempuan Kementerian Peranan Wanita, 2007 dalam Aslichati, L. (2011)).

Pekanbaru merupakan ibukota Propinsi Riau adalah salah satu daerah yang memiliki 83 kelurahan, dan 12 kecamatan yang tersebar, penyebaran ini memberikan gambaran mengenai keragaman masalah yang dihadapi di masyarakat. Apabila dilihat dari keilmuan manajemen, pada persoalan tim penggerak PKK, sebagai lembaga perempuan yang memiliki peran dalam kesejahteraan keluarga memang sepertinya masih jalan di tempat. Persoalan pengelolaan yang masih belum optimal, ditambah dengan persoalan yang lainnya berhubungan dengan masalah

transparansi pengelolaan PKK, masalah kepedulian terhadap warga masyarakat yang menjadi sasaran PKK, dan program PKK terkesan hanya seremonial, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus PKK dan juga pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka menjadikan PKK efektif.

Dari pengamatan lapangan yang dilakukan diketahui pengelolaan lembaga PKK oleh kader PKK masih belum optimal dan belum tampak perubahan berupa pemberdayaan kesejahteraan keluarga masyarakat yang diakibatkan dari kondisi yang ada khususnya dimasa pandemi covid 19 saat ini dimana masyarakat sangat membutuhkannya. Oleh karenanya dalam kajian ini melihat kondisi lapangan yang aktif mengelola lembaga PKK oleh kader ibu-ibu rumah tangga apakah pengelolaannya berdampak pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

## II. KERANGKA TEORI

Berbicara mengenai tata kelola lembaga PKK, sebelumnya dijelaskan tata kelola kelembagaan menurut Syakhroza dalam Wibowo (2012) sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Ashari (2010) Sedikitnya terdapat 3 (tiga) hal utama dalam melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan/ birokrasi yang efektif dan

efisien yaitu melakukan suatu langkah, upaya, ataukah perlakuan yang optimal dan merujuk kepada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan yang paling utama adalah sumberdaya manusia aparatur. Oleh karenanya, program reformasi birokrasi yang saat ini tengah gencar dilakukan, harus melibatkan atau mendasarkan prosesnya pada ketiga komponen utama tersebut diatas disamping faktor-faktor pendukung lainnya.

*Governance* merupakan suatu sistem, di mana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. *Good Governance* merupakan prinsip sangat universal, sehingga menjadi rujukan bagi semua umat beragama, serta dapat ditemukan pada kultur budaya di manapun. Hal yang membedakan praktik *Good Governance* di suatu negara adalah *Good Governance* sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu sendiri. Didalam menerapkan *governance* yang baik, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan dan waktu. (Wibowo, 2012)

Indikator tata kelola lembaga sosial itu sendiri termasuk PKK sebagai sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang menjalankan kegiatan dengan menggunakan sumber pendanaan publik atau dana pemerintah. Salah satu bentuk keterbukaan atau akuntabilitas terhadap pengelolaan PKK, dibutuhkan adanya pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat meningkatkan manajemen strategis (Ahdiyana, Marita, 2009).

Kemudian mengenai pemberdayaan kesejahteraan PKK ini dijelaskan menurut sejarahnya, PKK

semula merupakan akronim dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi perempuan melalui program pendidikan perempuan. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1972 organisasi tersebut berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga di bidang mental, spiritual dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan hidup. Anggotanya adalah tokoh/pemuka masyarakat, para isteri Kepala Dinas/Jawatan dan isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dengan adanya reformasi serta paradigma baru dan semangat otonomi daerah, sejak tahun 1999 akronim PKK berubah lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Kata pemberdayaan perempuan dipilih karena mengandung pengertian suatu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan kualitas perempuan melalui program pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan. (Aslichati, 2015)

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. (Shalfiah, 2017).

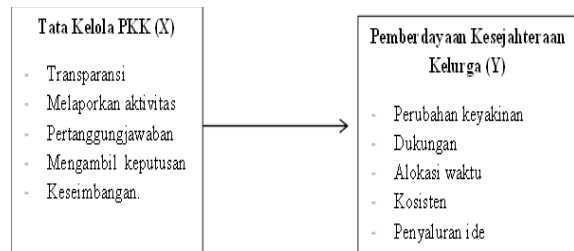
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK mempunyai 10 program kerja yang merefleksikan kebutuhan dasar manusia Indonesia, yaitu: 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2) gotong royong, 3) pangan, 4) sandang, 5) perumahan dan tatalaksana rumah tangga, 6) pendidikan dan keterampilan, 7) kesehatan, 8) pengembangan kehidupan berkoperasi, 9) kelestarian lingkungan hidup, 10) perencanaan sehat. (Aslichati, 2015)

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dijelaskan oleh Shalfiah, R. (2017) bahwa fungsi peran PKK adalah sebagai fasilitator dan penyuluh dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan PKK untuk mendukung program pemerintah Kota Bontang, tetapi karena berjalannya kegiatan penyuluhan dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi dan kesehatan dapat membantu meminimalisir masalah tersebut. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. PKK menjadi gerakan untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran,

kematian, sampai kegiatan masyarakat. PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. PKK conserndalam membela kaum miskin yang kelaparan dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan. Program kerja PKK berorientaasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Dan lebih dari itu, PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa.

Dari uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dalam kajian ini berkaitan dengan pengaruh tata kelola lembaga PKK terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan dari variabel tata kelola itu sendiri merupakan bentuk kepengurusan dari lembaga PKK antara lain dikaitkan dengan hal-hal Transparansi dalam pengelolaan PKK; Melaporkan aktivitas dalam mengurus PKK; Membuat pertanggungjawaban; Dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan kesepakatan; dan menyeimbangkan antara mengurus PKK dengan mengurus rumah tangga. Sedangkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu sendiri merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui aktifitas di lembaga PKK antara lain: keyakinan yang dimiliki mengenai perubahan positif dengan bergabung dalam kepengurusan PKK; Mendapatkan dukungan; Mengalokasikan waktu; konsisten menjaga komitmen; dan keinginan menyalurkan ide atau gagasan.



Gambar 1:  
Kerangka Teori

### III. METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan se Kota Pekanbaru dimana ruang lingkup pengumpulan data mencakup pada seluruh tim penggerak PKK tingkat kelurahan. Pada penelitian ini yang menjadi objek/ peubah yang diamati, modal sosial, tata kelola kelembagaan tim penggerak PKK Kelurahan. populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu tim penggerak PKK (ketua, sekretaris dan bendahara) yang berjumlah 249 orang. Sedangkan sampel diambil sebanyak 72 orang dengan menggunakan rumus slovin.

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi secara angung terhadap obyek yang diteliti melalui kuesioner. Dalam hal ini pengurus tim penggerak PKK Kelurahan yang diperoleh melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya studi literature terdahulu, studi kepustakaan, jurnal literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode dengan mengelompokan data kedalam suatu distribusi frekuensi dan kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang ada setelah itu baru dibuat suatu kesimpulan. Uji validitas dan uji reliabilitas serta uji normalitas dilakukan dalam penelitian ini untuk memastikan data normal dan juga layak digunakan dalam pengukuran statistic parametric.

Data analisis menggunakan metode regresi linier berganda. Untuk melihat persamaan umum regresi linier sederhana dapat dilihat

dengan metode ini. Analisis regresi sederhana merupakan teknik analisis yang umum digunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel terikat (Y) dengan satu variabel bebas (X). apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel, apakah masing-masing ada hubungan positif atau negatif.

Metode regresi linier sederhana dapat dihitung dengan menggunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

$\beta$  = Koefisien Regresi

X = Tata Kelola Tim Penggerak PKK Kelurahan

$\alpha$  = Konstanta

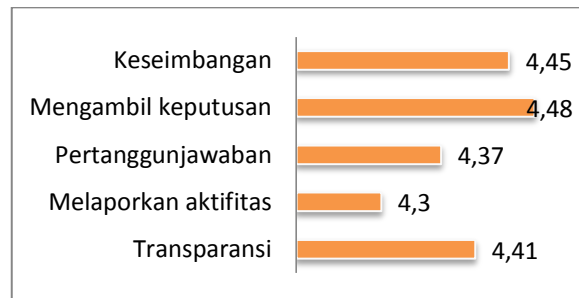
$\varepsilon$  = Variabel Error ( *random error* )

#### IV. ANALISA DATA

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di lapangan terhadap 72 orang pengurus tim penggerak PKK kelurahan di Kota Pekanbaru, berikut ini dipaparkan hasil deskripsi data deskripsi tentang tata kelola tim penggerak PKK dan dilanjutkan dengan deskripsi tentang pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta analisis berkaitan dengan dampak ata kelola tim penggerak PKK Kelurahan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga, sebagai berikut:

Tata kelola tim penggerak PKK menjadi variabel yang berkaitan dengan kepengurusan lembaga PKK yang merupakan kegiatan sosial masyarakat yang di program pemerintah dan ini telah dilaksanakan. Menggunakan skala tanggapan responden yang sama dengan uraian sebelumnya dan pada variabel tata kelola tim penggerak PKK Kelurahan dengan menyebarkan kuesioner pengurus PKK berkenaan dengan transparansi dalam pengelolaan PKK; Melaporkan aktivitas dalam mengurus PKK; Membuat pertanggungjawaban; Dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan kesepakatan; dan menyeimbangkan antara mengurus PKK

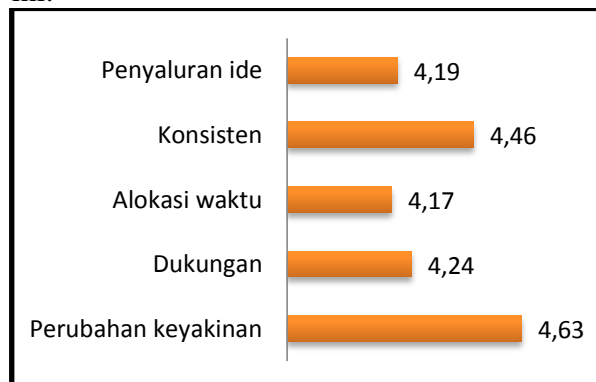
dengan mengurus rumah tangga diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 2  
Tata Kelola lembaga PKK Kelurahan di Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa total skor tata kelola lembaga PKK yang dikelola oleh tim penggerak PKK dengan skor sebesar 4,4 yang masuk dalam kategori sangat baik. Kemudian dapat dilihat dari lima indikator yang dimiliki dapat diketahui item tertinggi terletak pada hal pengambilan keputusan selalu pada kesepakatan dan item terendah adalah pada selalu melaporkan aktivitas dalam mengurus PKK sesuai dengan bidangnya.

Kemudian diikuti dengan deskripsi variabel pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang dikaitkan dengan lima indikator antara lain: keyakinan yang dimiliki mengenai perubahan positif dengan bergabung dalam kepengurusan PKK; Mendapatkan dukungan; Mengalokasikan waktu; konsisten menjaga komitmen; dan keinginan menyalurkan ide atau gagasan. Uraianya dapat dilihat dari data berikut ini.



Gambar 2  
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat diketahui bahwa deskripsi pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan rata-rata skor sebesar 4,33 ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga sudah berdaya, dimana dari lima indikator yang digunakan dapat diketahui indikator tertinggi adalah pada perubahan keyakinan, ini bermakna bahwa melalui PKK ibu rumah tangga memiliki keyakinan adanya perubahan kesejahteraan di masa depan. Dan diikuti dengan konsisten yang bermakna bahwa apabila ibu rumah tangga konsisten dan komitmen mengikuti program yang ada pada PKK itu sendiri maka kesejahteraan akan berubah. Sedangkan indikator terendah adalah pada alokasi waktu, dimana ibu rumah tangga masih bermasalah dalam membagi waktu mengurus rumah tangga dengan aktif pada lembaga PKK dan juga penyaluran ide yang masih rendah dari ibu rumah tangga, karena mereka masih merasa sungkan dalam banyak berbicara dalam forum PKK itu sendiri.

Perhitungan dengan analisis regresi linier sederhana diperoleh data berkaitan dengan besarnya nilai pengaruh variabel tata kelola modal terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga tim penggerak PKK Kelurahan Kota Pekanbaru dengan nilai sebagai berikut:

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.518	1.768		5.951	.000
Tata Kelola PKK	.506	.080	.605	6.350	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan keluarga

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = 10.518 + 0,506X$$

Keterangan:

1. Konstanta sebesar 10.518 yang berarti bahwa besarnya nilai pemberdayaan kesejahteraan keluarga tim penggerak

PKK Kelurahan bernilai 10.518 satuan pada saat X sama dengan nol.

2. Koefisien regresi tata kelola lembaga PKK sebesar 0,506 ini berarti bahwa variabel tata kelola berpengaruh positif terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga tim penggerak PKK Kelurahan, yang mana semakin baik tata kelola lembaga PKK maka akan semakin berdaya kesejahteraan keluarga.
3. Berdasarkan perhitungan t hitung dengan memperlihatkan nilai t hitung dan kemudian juga nilai sign dan apabila nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka variabel yang diuji tidak berpengaruh signifikan. Namun apabila nilai sign lebih kecil dibandingkan dengan alpa 0,05 maka variabel yang uji memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai signifikansi variabel tata kelola yakni nilai P Value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola lembaga PKK oleh tim penggerak PKK berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kota Pekanbaru

Berdasarkan uraian di atas, dapat membuktikan bahwa memang benar tata kelola lembaga PKK bila dilaksanakan dengan baik yakni transparansi dalam pengelolaan PKK; Melaporkan aktivitas dalam mengurus PKK; Membuat pertanggungjawaban; Dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan kesepakatan; dan menyeimbangkan antara mengurus PKK dengan mengurus rumah tangga. Maka akan berdampak positif dan signifikan terhadap pemberdayaan

kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian ini sesungguhnya menjawab keraguan permasalahan pengelolaan lembaga PKK di Kota Pekanbaru yang belum optimal, apalagi dimasa covid 19 ini. Malahan dimasa pandemi seperti saat ini peran lembaga PKK sangat besar dalam menyadarkan keluarga untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga mencari solusi berbagai persoalan dalam keluarga berkaitan dengan persoalan kesejahteraan. Tim pengelola lembaga PKK sebagai perpanjangan tangan pemerintah dapat menyampaikan kepada pemerintah dari berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat tersebut. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & Manar, D. G. (2020) bahwa tata kelola dapat mengefisienkan pengelolaan itu sendiri dalam mencapai tujuannya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelola tim penggerak PKK berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kota Pekanbaru. Ini menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan lembaga PKK akan berdampak pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga khususnya yang dilakukan melalui upaya pengambilan keputusan bersama dalam pengelolaan lembaga PKK namun hal yang masih rendah adalah kurangnya konsultasi dengan pemerintah dengan melaporkan kejadian di masyarakat dalam kesejahteraan keluarga, sehingga program pemerintah terkadang kurang sejalan dengan persoalan di masyarakat.

### Saran

Diharapkan lembaga tim penggerak PKK dapat dikelola dengan optimal yakni melalui upaya selalu memberikan laporan kepada pemerintah kelurahan terhadap berbagai aktifitas atau kejadian kesejahteraan di keluarga yang kurang berdaya sehingga dapat dilanjutkan kepada pemerintah kota Pekanbaru dan hal ini dapat dibuatkan

program yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi keluarga di kota Pekanbaru.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyana, M. (2009). Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi UNY*.
- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & Manar, D. G. (2020). MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA, MENGEFEKTIFKAN DANA DESA. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(4), 268-274.
- Ashari, E. T. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi yang Baik. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(2).
- Aslichati, L. (2011). Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. *Jurnal organisasi dan manajemen*, 7(1), 1-7.
- Shalfiah, R. (2017). Peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program pemerintah kota bontang. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 1(3), 975-984.
- Wibowo, E. (2012). Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia. *Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2).